

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada saat ini.

1. **Anggi Rizkita (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan yang diukur dengan indeks konservatisme. Adapun sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan 12 perusahaan dengan periode pengamatan 5 tahun sehingga total sampel adalah 60 sampel yang ditentukan dengan menggunakan metode estimasi regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan secara parsial hanya ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian saat ini:

1. Menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial.

2. Menggunakan variabel dependen integritas laporan keuangan.

Perbedaan dengan penelitian saat ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kualitas audit sedangkan saat ini menambahkan beberapa variabel independen diantaranya kepemilikan publik, komisaris independen, dewan direksi dan dewan komisaris.
2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* sedangkan penelitian saat ini menggunakan sektor manufaktur.
3. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2010-2014 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2011-2015.
4. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data panel sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

2. Octavia dan Arifin (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, *audit tennure*, spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 dan didapatkan sampel sebanyak 184 data pengamatan dari 46 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian Metode yang digunakan pada penelitian ini analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan

sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan saham institusional, *audit tenure* dan spesialisasi industri audit tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian saat ini:

1. Menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen.
2. Menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menggunakan variabel dependen integritas laporan keuangan.
4. Menggunakan metode penelitian analisis regresi linier berganda.

Perbedaan dengan penelitian saat ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *audit tenure* dan spesialisasi industri auditor sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel independen kepemilikan publik, dewan direksi, dan dewan komisaris.
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2008-2011 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2011-2015.

3. Ida Ayu & I Dewa Gede (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governanc*, *leverage*, ukuran perusahaan, terhadap integritas laporan keuangan yang diukur menggunakan indeks konservatisme. Sampel penelitian ini

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 48. Metode statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yaitu komite audit, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, namun kepemilikan institusional tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. *Leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian saat ini:

1. Menggunakan variabel independen komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional.
2. Menggunakan variabel dependen integritas laporan keuangan.
3. Sampel penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Perbedaan dengan penelitian saat ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan *leverage* sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2012 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2011-2015.

4. Yani dan I Ketut (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit dan dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki variabel kepemilikan manajemen dalam perusahaan dan data laporan keuangan secara lengkap. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 45 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama periode 2010-2012. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan institusional dan dewan direksi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan variabel kepemilikan manajemen, komisaris independen serta komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian saat ini:

1. Menggunakan variabel independen komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
2. Menggunakan variabel dependen integritas laporan keuangan.
3. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*.
4. Populasi yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan dengan penelitian saat ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2010-2012 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2011-2015.

5. Pancawati (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, *corporate governance*, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2008. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling method* yang tidak teregulasi dan diperoleh sebanyak 73 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor, komite audit, komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian saat ini:

1. Menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris,
2. Menggunakan variabel dependen integritas laporan keuangan.
3. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*.
4. Populasi yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan dengan penelitian saat ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2005-2008 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2011-2015.
2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen independensi sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel independen independensi.

6. Kartika (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, komisaris dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan yang masuk dan konsisten tergolong dalam LQ45 dalam jangka waktu dari tahun 2001-2008. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dewan direksi, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian saat ini:

1. Menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial, dan dewan direksi.
2. Menggunakan variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan.
3. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Perbedaan dengan penelitian saat ini:

1. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2001-2008 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2011-2015.
2. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen kepemilikan publik, komite audit, komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris namun penelitian saat ini menambahkan variabel tersebut.



Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen						
			Kep. Institusional	Kep. Manajerial	Kep. Publik	Komite Audit	Komisaris Independen	Dewan Direksi	Dewan Komisaris
1.	Anggi Rizkita (2015)	Integritas Laporan Keuangan	-	S	-	-	-	-	-
2.	Yani & I Ketut (2014)		S	TS	-	TS	TS	S	-
3.	Octavia dan Arifin (2013)		TS	TS	-	S	S	-	-
4.	Ida Ayu & I Dewa Gede (2013)		TS	-	-	S	S	-	-
5.	Pancawati (2010)		TS	S	-	TS	TS	-	-
6.	Kartika (2010)		S	S	-	S	-	S	S

Sumber : Data diolah

Keterangan : S = Signifikan

TS = Tidak signifikan

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan merupakan hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan dasar teori yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*. Teori keagenan memiliki hubungan kontraktual antara anggota-anggota di suatu perusahaan. Adapun prinsip utama dari teori ini adalah untuk menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu para investor dengan pihak yang menerima wewenang yaitu para manajer.

Menurut Bayu (2010) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dari manusia diantaranya:

- (1) Manusia pada umumnya akan mementingkan dirinya sendiri (*self interest*).
- (2) Manusia mempunyai daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa yang akan mendatang (*bounded rationality*).
- (3) Manusia selalu akan berusaha menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan ketiga asumsi sifat dasar manusia tersebut manusia akan bertindak *opportunistic*. Pihak *agent* termotivasi untuk memaksimalkan *fee* kontraktual yang akan diterima sebagai suatu sarana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologis. Begitupun sebaliknya, pihak *principal* termotivasi untuk mengadakan

suatu kontrak atau memaksimalkan *return* dari sumber daya untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang akan selalu bertambah. Konflik kepentingan tersebut terus bertambah karena dari pihak *principal* tidak dapat melakukan pengecekan aktivitas *agent* sehari-hari guna untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan semua para pemegang saham. Sebaliknya, *agent* sendiri mempunyai banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan pekerjaan, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut yang memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* dan dapat memicu manajer untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keterkaitan teori agensi dengan integritas laporan keuangan adalah semakin ketatnya persaingan antara kedua belah pihak maka akan memicu para manajemen untuk berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan.

Masalah keagenan yang dihadapi dalam konteks perusahaan para investor mengacu pada kesulitan untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Yani, 2011). Menurut Jensen dan Meckling (1976), penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencairan dana dan bagaimana dana tersebut diinvestasikan.

2.2.2 Integritas Laporan Keuangan

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan dan berbagai hal yang dihasilkan. Menurut Mulyadi (2002)

integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak dan jujur. Seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut apa adanya. Jama'an (2008) menyatakan integritas laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur sehingga tidak menyesatkan pengguna dalam membuat keputusan. Menurut Pancawati (2010) integritas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Berdasarkan berbagai pengertian integritas laporan keuangan dapat disimpulkan integritas laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan secara jujur dengan menggambarkan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya.

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi guna memberikan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan (Atik, 2015). Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas entitas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi (Sofyan, 2011:70).

Menurunnya integritas laporan keuangan perusahaan akan memicu terjadinya manipulasi informasi akuntansi yang secara langsung akan melibatkan *Chief Executive Officer* (CEO), komite audit, komisaris, eksternal auditor dan internal auditor (Anggi, 2015). Hal ini menyebabkan timbulnya keraguan dari pihak masyarakat terhadap pihak internal perusahaan. Integritas laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan indeks *konservatisme*, yaitu sebuah prinsip kehati-

hatian dalam mengakui aset dan laba karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Ida & I Dewa, 2013).

Laporan keuangan bisa dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* (Kieso, 2001:38). Menurut Schroeder (2001) dalam Saputri (2010: 48-49) *reliability* mempunyai kualitas sebagai berikut:

- a. *Verifiability*
Laporan keuangan suatu entitas yang memiliki kondisi sama dengan laporan keuangan entitas lain dan akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.
- b. *Representational faithfulness*
Keterangan dan angka yang disajikan sesuai dengan yang ada dan benar-benar terjadi.
- c. *Neutrality*
Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan dari pihak tertentu.

Pengukuran integritas laporan keuangan yang diproksikan dengan konservatisme ditentukan dengan menggunakan asumsi metode perusahaan yang digunakan yaitu metode persediaan, penyusutan, metode amortisasi, dan pengakuan biaya riset (Widya, 2005). Penmann dan Zhang (2002) menggunakan *conservatism index* (*C-score*) sebagai proksi konservatisme neraca. *C-score* menunjukkan tingkat estimasi cadangan akibat penggunaan metode akuntansi konservatif. Integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indeks conservatism yang dikemukakan Penmann dan Zhang (2002) yang menjelaskan akuntansi konservatif dan kualitas laba bergantung pada pertumbuhan investasi perusahaan, dengan rumus sebagai berikut:

$$C_{it} = \frac{(RP_{it} + DEPR_{it})}{NOA_{it}}$$

Keterangan:

- C = Indeks *conservatism*
 RP = Jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan.
 DEPR = Biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan.
 NOA = *Net operating assets*, yang diukur dengan rumus kewajiban keuangan bersih : (total hutang + total saham + total dividen) – (kas + total investasi)

2.2.3 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan konsep yang digunakan demi peningkatan kinerja perusahaan (Pancawati, 2010). *Corporate Governance* dapat dilakukan dengan monitoring dan supervisi kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasari pada kerangka peraturan. *Corporate Governance* diterapkan perusahaan agar manajemen dapat mengelola perusahaan lebih baik dan informasi yang dihasilkan lebih transparan bagi para pengguna laporan keuangan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melihat *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana perusahaan atau entitas bisnis harus diarahkan dan diawasi (Akbar, 2015). Sejalan dengan itu maka struktur *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan

kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik. *Corporate governance* dilaksanakan dengan tujuan agar kualitas laba yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan menjadi lebih andal (Indah, *et al*, 2010). Secara umum *corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor : KEP-117/MBU/2002 perlu diterapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik . Prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu: *Transparency*, *Independency*, *Accountability*, *Responsibility*, dan *Fairness* (KNKG, 2012).

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)
Transparency secara sederhana dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup lengkap, akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan sehingga mengetahui resiko yang mungkin terjadi.
2. *Independency* (Kemandirian)
Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
Akuntabilitas merupakan pelaksanaan, kejelasan fungsi, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif maka ada kejelasan fungsi hak, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab antara dewan komisaris, pemegang saham dan dewan direksi.
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul akibat peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

1. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik didalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar negeri (Susiana dan Arleen, 2007: 8). Kepemilikan institusional adalah presentase jumlah saham pada akhir tahun akuntansi yang dimiliki oleh pihak eksternal diantaranya perusahaan, lembaga, asuransi, bank atau institusi lain (Bukhori, 2012). Investor institusional merupakan investor yang memiliki pengalaman sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh tindakan manajer seperti manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan investor institusional dapat meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan (Yani dan I Ketut, 2014). Akan tetapi, fokus investor institusional pada laba saat ini menyebabkan investor tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan (Tia, 2011). Adapun cara pengukuran kepemilikan institusional menurut Jama'an (2008) yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan.

2. **Kepemilikan Manajerial**

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Susanti (2010) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan pada perusahaan yang

bersangkutan. Jika kepemilikan manajerial di dalam perusahaan semakin tinggi maka manajemen akan lebih meningkatkan kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham. Kepemilikan ini mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebab besarnya saham yang dimiliki pihak manajemen diharapkan akan bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan (Irfana dan Muid, 2012). Adapun cara pengukuran kepemilikan manajerial menurut Jama'an (2008) yaitu kepemilikan saham oleh pihak manajemen dibagi dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan.

3. **Kepemilikan Publik**

Kepemilikan publik merupakan presentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownnership*). Wijayanti (2009: 20) menyatakan kepemilikan publik adalah proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Menurut Febriantina (2010) menyatakan kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau pihak luar termasuk didalamnya terdapat masyarakat umum serta investor dari lembaga/perusahaan lain yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan penawaran saham. Publik yang dimaksudkan dalam variabel tersebut berupa pribadi atau suatu institusi, dimana keberadannya menuntut untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang jelas, jujur, dan tepat waktu.. Kepemilikan publik dapat diukur dengan menghitung jumlah saham yang beredar di masyarakat dibagi dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan (Gede & Asmara, 2015).

4. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara audit eksternal dan dewan direksi, internal auditor serta anggota independen yang memiliki tugas memberikan pengawasan auditor dan memastikan pihak manajemen untuk melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi. Komite audit adalah badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan (Susiana dan Arleen, 2007). Komite audit dalam perusahaan bertujuan untuk memantau perilaku manajemen yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan manajemen untuk melakukan manipulasi data. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang anggota komisaris independen. Komite audit yang efektif akan membantu terciptanya keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan pengawasan internal yang memadai (Dendy, 2015). Menurut Alijoyo (2003) dalam Anggita (2014) komite audit harus melakukan sedikitnya rapat empat kali dalam jangka waktu satu tahun.

Badan Pengelola Pasar Modal (BAPEPAM) dalam peraturan No. IX.1.5 yang berisi pedoman pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit yang menyebutkan jumlah kehadiran anggota komite audit minimal separuh dari jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan. Jika semakin banyak rapat yang dilaksanakan komite audit diharapkan mampu meningkatkan integritas laporan keuangan, dengan sering diadakannya rapat maka kontrol dan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dapat terus dipantau secara efektif. Berdasarkan keputusan BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2000 dan SE-07/PM/2004 menyatakan

bahwa suatu perusahaan yang *go public* wajib memiliki komite audit karena alasan tersebut maka pengukuran komite audit menjadi jumlah anggota komite audit. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Adapun cara pengukuran komite audit menurut keputusan BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2000 dan SE-07/PM/2004 adalah jumlah anggota komite audit. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

5. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dan berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Emirzon, 2007). Komisaris independen berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku para manajer sehingga dapat melindungi hak para pemegang saham eksternal (Ida Ayu & I Gede 2013). Komisaris independen merupakan anggota atau orang dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan pihak manajemen, anggota dewan komisaris yang lainnya dan para pemegang saham pengendali, maupun bebas dari suatu hubungan bisnis atau hubungan yang lain yang mempunyai kemungkinan tidak dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak dengan independen atau bertingkah laku semena-mena demi kepentingan suatu perusahaan (KNKG, 2004). Pengukuran dewan komisaris independen yaitu dengan cara menambah semua anggota dewan komisaris independen yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dibagi dengan total dewan komisaris pada perusahaan sampel. Jika didalam laporan keuangan tidak di ketahui berapa jumlah anggota dewan

komisaris independen , maka akan diasumsikan perusahaan tersebut mempunyai komisaris independen hanya sebanyak 1 orang, karena di dalam undang-undang perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk mempunyai dewan komisaris independen.

6. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dewan direksi mempunyai peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Aji, 2012). Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan dengan efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi dari direksi harus sedemikian rupa sehingga pada saat pengambilan keputusan secara tepat, efektif dan cepat, serta dapat bertindak independen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dewan direksi diukur dengan jumlah keseluruhan dewan direksi dalam struktur kepengurusan (Iqbal, 2012).

7. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam

perusahaan (Tia, 2011). Proporsi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Dewan komisaris dapat diukur dengan menggunakan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap keseluruhan dewan komisaris yang dimiliki perusahaan (Nurul, 2016).

2.2.4 Hubungan Antar Variabel

1. **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh keberadaan pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen, terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan sesuai kepentingan manajemen (Ocktavia dan Arifin, 2013). Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic*. Semakin banyak kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan maka tingkat integritas laporan keuangan semakin tinggi, karena investor institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap kepemilikan sahamnya (Ocktavia dan Arifin, 2013). Penelitian Dewanti (2011), Pancawati (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan berbeda dengan penelitian Atik (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer dan direktur perusahaan (Anggi, 2015). Kepemilikan ini merupakan salah satu mekanisme yang dapat dilakukan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Manajer pada perusahaan cenderung memiliki presentase kepemilikan dengan tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan (Tia, 2011). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan yang dapat diartikan semakin tinggi kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka tingkat integritas laporan keuangan juga akan semakin tinggi, karena kepemilikan saham yang tinggi akan membuat manajer secara langsung merasakan manfaat dari keputusan ekonomi yang telah diambil dan menanggung konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Manajer cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola perusahaan dan menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur untuk kepentingan pemegang saham dan dirinya sendiri (Octavia dan Arifin, 2013). Peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mampu mendorong manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer dalam bertindak terhadap kegiatan akuntansi. Sehingga kebijakan yang dilakukan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan yang disajikan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Octavia dan Arifin (2013) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan

keuangan berbeda dengan penelitian Budi (2015) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

3. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan publik menggambarkan jumlah saham yang beredar di masyarakat. Semakin banyak kepemilikan publik diperusahaan maka perusahaan lebih dituntut untuk memberikan informasi laporan keuangan dengan jelas dan jujur. Agar mendapatkan kepercayaan yang lebih dari pihak investor saat ini maupun dimasa mendatang.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Audit merupakan alat manajemen yang penting digunakan untuk memverifikasi bukti obyektif, dan menilai keberhasilan dari proses yang telah dilaksanakan (Saputra, Desmiawati, & Anisma, 2014). Komite audit merupakan komite yang dibentuk dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan. Komite audit yang bekerja dengan baik di perusahaan tentu akan memberikan dampak laporan keuangan yang transparan saat disajikan. Hasil penelitian Ocktavia & Arifin (2013) dan I Dewa Gede (2013) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sedangkan hasil penelitian Pancawati (2010) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

5. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Octavia & Arifin, 2013). Selain itu keberadaan komisaris independen di perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan ekonomi khususnya dalam perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait. Komisaris independen merupakan solusi terbaik guna mengurangi resiko manipulasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap keintegritasan laporan keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris independen akan lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan intern pihak perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Pancawati (2010) yang mengatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, karena di perusahaan terdapat badan yang mengawasi secara langsung dan melindungi hak pihak-pihak minoritas diluar manajemen perusahaan berbeda dengan penelitian Maya (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

6. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Integritas Laporan Keuangan

Dewan direksi memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek maupun jangka panjang

(Aji, 2012). Semakin banyak dewan direksi didalam perusahaan maka semakin tinggi integritas laporan keuangan, karena dengan adanya dewan direksi mampu mengatur kebijakan yang dijalankan perusahaan. Apabila perusahaan tidak menginformasikan laporan keuangan dengan jujur dan jelas maka dewan direksi yang memiliki wewenang dan menindak lanjuti yang dilakukan para manajer perusahaan guna melindungi para investor. Penelitian yang dilakukan oleh Yenmarck (1996) memperoleh hasil dewan direksi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yani & I Ketut (2014) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

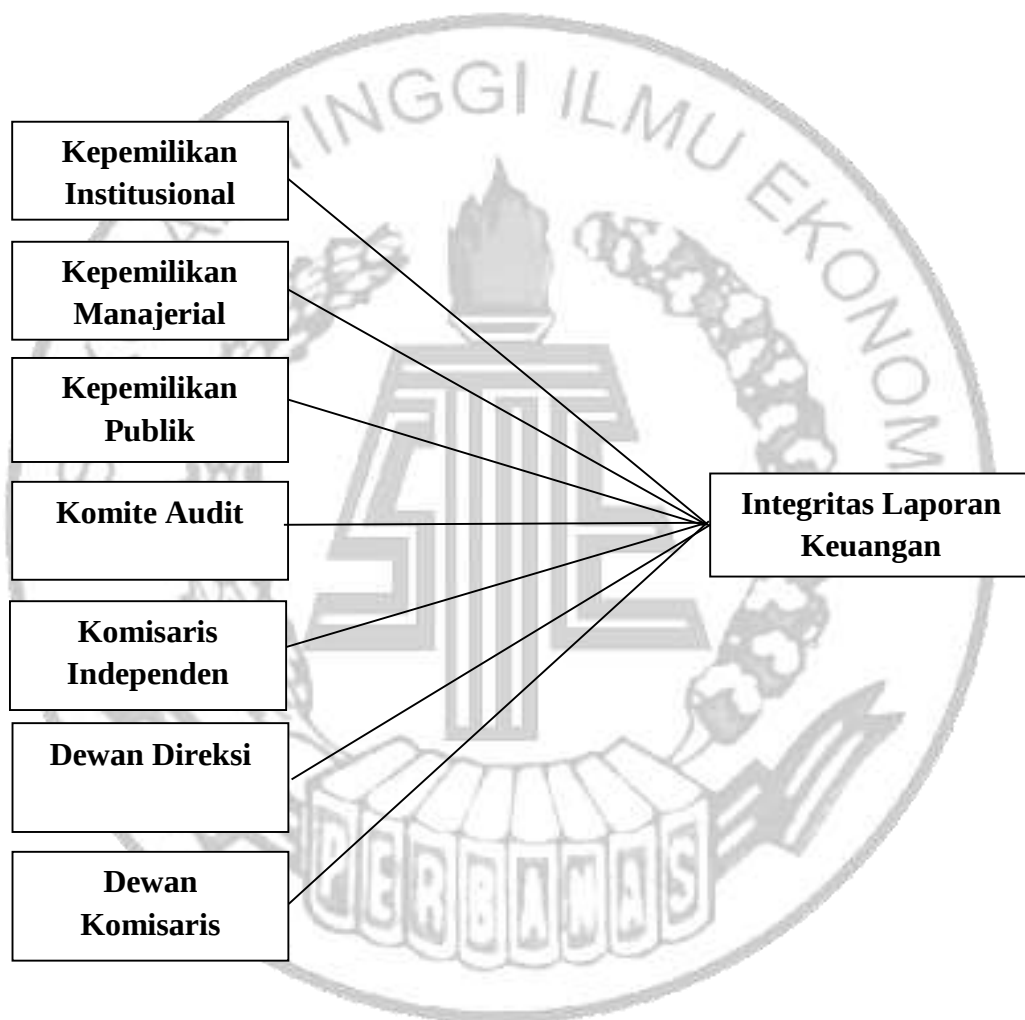
7. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Integritas Laporan Keuangan

Suatu argumen menyatakan semakin banyak dewan komisaris dapat berakibat makin buruknya kualitas laporan keuangan dan kinerja yang dimiliki perusahaan (Pancawati, 2010). Hal ini dijelaskan dengan adanya *agency problem* yaitu dengan makin banyak anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya (Pancawati, 2010). Semakin banyak dewan komisaris diperusahaan akan membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pada laporan keuangan yang semakin menurun (Pancawati, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2010) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan

Pancawati (2010) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian atau penyelesaian diatas maka secara sistematis dapat disusun kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.3

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar diatas menjelaskan tentang kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Gambar tersebut dapat diketahui variabel independen adalah

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, komite audit, komisaris independen, dewan direksi, dan dewan komisaris. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan.

2.4 **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti dan diuji dengan suatu pembuktian dan kebenaran berdasarkan fakta. Adapun kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
- H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
- H3 : Kepemilikan publik berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
- H4 : Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
- H5 : Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

H6 : Dewan direksi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

H7 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

